

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong laju pembangunan daerah. Wilayahnya terdiri atas dua pulau besar dan pulau-pulau kecil yang membentang antara 115°46'- 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan luas daratan 20.153.15 km persegi dan luas laut 29.159.04 km persegi serta panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Berdasarkan Buku Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2015, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 4.773.795 jiwa, terdiri atas 2.315.234 jiwa laki-laki dan 2.458.561 jiwa perempuan. Pulau Lombok dengan luas daratan 4.738,70 km persegi (22,78 %) berpenduduk 3.352.988 jiwa (70,24 %), sedangkan Pulau Sumbawa yang luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22 %) hanya berpenduduk 1.420.807 jiwa (29,76 %).

Dengan demikian luas daratan dan jumlah penduduk kedua pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berbanding terbalik; yang menggambarkan pula potensi dan permasalahan berkaitan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antarwilayah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Potensi dan permasalahan tersebut dapat dikelola dari aspek ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta unit-unit pelaksana teknis dinas.

Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyusun perubahan rencana strategis untuk tahun 2013 sampai dengan 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian.
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian.
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.
 15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018; dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dari tahun 2013 sampai dengan 2018 menjadi lebih efisien, efektif dan berkualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan memuat kondisi umum yang melatar belakangi penyusunan rencana strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran Pelayanan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta jenis pelayanan dan kelompok sasaran.

Bab III. Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memuat tentang gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan, hasil-hasil yang telah dicapai lima tahun sebelumnya, analisis isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dan analisis lingkungan strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis disertai dengan perkiraan sumber-sumber pendanaan yang mendukung program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

Bab VI. Indikator Kinerja yang mengacu RPJMD.

Bab VII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menetapkan tentang :

1. Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- b) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- c) pelaksanaan administrasi dinas; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dilengkapi perangkat organisasi yang tergambar dalam susunan organisasi dan struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing; dan

- 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Pemagangan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Norma Ketenagakerjaan;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- g. Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi;
 - 2) Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; terdiri atas :
 - a. Pengawas
 - b. Instruktur
 - c. Mediator/Perantara
 - d. Pengantar Kerja
 - e. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
 - f. Pranata Laboratorium Kesehatan Kerja, dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
 - a) Balai Latihan Kerja;
 - b) Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - c) Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi;
 - d) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok; dan
 - e) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	Kepala Dinas	<p>memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. merumuskan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk menghasilkan RENSTRA, RENJA, RKA, LAKIP, Laporan Bulanan, Lapor Semesta, Laporan Tahunan, LKPD, PK, IKU dan petunjuk teknis;</p> <p>b. membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;</p> <p>d. mengkoordinasikan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, kepala UPTD mengacu pada pola dasar pembangunan daerah NTB, kebijaksanaan Gubernur, kondisi obyektif dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>e. membina bawahan dalam mencapai program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB ;</p> <p>f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan</p>	<p>a. perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;</p> <p>b. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;</p> <p>c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;</p> <p>d. perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala UPTD;</p> <p>e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan</p> <p>f. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<p>pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;</p> <p>g. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;</p> <p>h. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku;</p> <p>i. melaporkan hasil kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian kepada Gubernur; dan</p> <p>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>	
2	Sekretaris	membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum,		<p>a. membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;</p> <p>b. membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD dalam penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ kerja, pengendalian dan</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
		kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor		<p>pengawasan.</p> <p>c. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;</p> <p>d. pengelolaan urusan keuangan;</p> <p>e. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan</p>
3	Sub Bagian Program	menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;</p> <p>d. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;</p> <p>e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;</p> <p>f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;</p> <p>g. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);</p> <p>h. penyusunan Rencana Kerja Anggaran</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<p>(RKA);</p> <ul style="list-style-type: none"> i. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); j. penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT); k. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; l. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; p. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP); q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; r. menyusun LPPD dan LKPJ; s. menyusun profil ketenagakerjaan dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			profil UPT Bina; t. menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi RPJMD, laporan Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi publik (DIP); u. penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD); v. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	
4	Sub Bagian Keuangan	melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.	a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan; d. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas; f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<p>dan perbendaharaan;</p> <p>g. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;</p> <p>h. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);</p> <p>i. melaksanakan penatausahaan keuangan;</p> <p>j. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;</p> <p>k. melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;</p> <p>l. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>m. menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;</p> <p>n. menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;</p> <p>o. menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;</p> <p>p. menerima, pengadministrasian dan penyeteran penerimaan daerah;</p> <p>q. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan	
5	Sub Bagian Umum	melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; e. melaksanakan administrasi kepegawaian; f. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; g. melaksanakan urusan rumah tangga; h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 	
6	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	menyediakan informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga		<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja; b. penempatan dan perlindungan tenaga kerja; c. pembinaan terhadap lembaga

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
		kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal.		penempatan tenaga kerja; d. pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; e. pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat karya, teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.
7	Seksi Informasi Pasar Kerja	mengumpulkan dan mengolah data, menyusun sistem dan pedoman serta melakukan pembinaan terhadap informasi pasar kerja.	h. melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota; i. melakukan analis jabatan; j. melakukan kegiatan pamewran bursa kerja (Job fair); k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	
8	Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing	menyediakan pedoman sistim pelayanan penempatan tenaga kerja dan menempatkan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja Khusus (AKSUS/Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Melakukan Pembinaan	a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja; d. membuat MOU peluang kerja dalam	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
		<p>terhadap lembaga penempatan tenaga kerja dan operasional (LPTKS/PPTKIS) serta Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).</p>	<p>dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD dan AKAN);</p> <p>e. melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja Khusus (AKSUS / Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);</p> <p>f. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS maupun PPTKIS);</p> <p>g. melakukan pelayanan perpanjangan izin operasional terhadap (LPTKS/PPTKIS);</p> <p>h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga kerja;</p> <p>i. melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p> <p>j. melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</p> <p>k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
9	Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	<p>menyiapkan bahan atau materi pembinaan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja,</p>	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
		<p>mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (produktif dan infrastruktur), terapan teknologi tepat guna dan melakukan bimtek / peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja.</p>	<p>bawah agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. menyiapkan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;</p> <p>d. melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;</p> <p>e. mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif dan padat karya infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)</p> <p>f. melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan kesempatan kerja (bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan padat karya dan pemandu lapangan terapan TTG);</p> <p>g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
10	Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	<p>menyusun perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.</p>		<p>a. pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>b. pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;</p> <p>c. pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;</p> <p>d. pembinaan instruktur, tenaga</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
				<p>kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;</p> <p>e. pembinaan Pemagangan tenaga kerja;</p> <p>f. pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan.</p> <p>g. pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas.</p>
11	Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan	melaksanakan pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan, Lembaga pelatihan, akreditasi dan Sarana prasarana dan peralatan	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan pelatihan, akreditasi dan sarana prasarana;</p> <p>d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan pelatihan dan sarana prasarana;</p> <p>e. melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;</p> <p>f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
12	Seksi Pemagangan	melaksanakan Pembinaan Pemagangan tenaga kerja.	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<p>bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;</p> <p>d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;</p> <p>e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;</p> <p>f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>	
13	Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	melakukan pembinaan pelatihan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>d. menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			kompetensi, sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.	
14	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan industrial, pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial (kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial).		a. perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan pembinaan syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitas kesejahteraan pekerja dan purna kerja; b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat – syarat kerja dalam hubungan kerja dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan; c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja; e. pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
				industrial; dan f. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
15	Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial	membina pelaksanaan syarat-syarat kerja, dan pembentukan sarana hubungan industrial, serta mensosialisasikan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Apindo, serta sosialisasi hubungan industrial, dan hubungan kerja; d. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan, serta ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURING); e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan dan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial di perusahaan; g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan h. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan. 	
16	Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>pembinaan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Peningkatan derajat kesehatan bagi pekerja/buruh peserta program Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah minimum dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; d. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah minimum; e. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL); f. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur dan skala upah; g. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun); 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan Kabupaten/Kota se NTB; i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 	
17	Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	membina dan mencegah perselisihan hubungan industrial yang akan terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh serta menyelesaikan perselisihan industrial sesuai pengaduan masyarakat (Pengusaha Pekerja SP/SB, LSM, Praktisi dll).	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselisihan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; e. melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan industrial; f. melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan; g. melaksanakan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait persidangan kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat; i. melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase hubungan industrial, dan kordinasi dengan pihak kepolisian; j. menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demonstrasi pekerja/buruh dan lock out; k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 	
18	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.		<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan; b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan; c. pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan; d. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
				ketenagakerjaan dan norma K3; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
19	Seksi Norma Ketenagakerjaan	melaksanakan pembinaan , pengawasan, pemeriksaan penerapan norma kerja, norma kerja perempuan, norma kerja anak, norma pengupahan, norma jaminan sosial tenaga kerja dan norma pelatihan serta penempatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja anak; d. menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja,, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja anak; e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<p>perempuan, norma kerja anak, norma pelatihan, dan norma penempatan;</p> <p>f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.</p>	
20	Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;</p> <p>d. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;</p> <p>e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			<p>keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;</p> <p>f. memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;</p> <p>g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.</p>	
21	Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum	melaksanakan pembinaan pengendalian, evaluasi, koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibidang kelembagaan dan tenaga pengawas dan penegakan hukum ketenagakerjaan.	<p>a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan hukum</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			ketenagakerjaan; d. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan; e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja dengan korwas, dan lembaga lain terkait; g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan h. melaksanakan tugas lain yang di perintah pimpinan.	
2	Bidang Ketransmigrasian	melaksanakan perumusan kebijakan, Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman, perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.		a. melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian; b. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis, penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan; c. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perpindahan dan penempatan; d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan transmigrasi; dan e. penyelenggaraan monitoring dan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
				evaluasi program kerja bidang Ketransmigrasian.
23	Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi	melaksanakan penyiapan bahan pengurusan penyediaan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman transmigrasi; d. melakukan fasilitasi identifikasi calon areal permukiman transmigrasi; e. melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman transmigrasi; f. melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman transmigrasi; g. fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha, pengukuran dan pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas dengan kawasan hutan, pengurusan dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL dan sertifikat hak milik transmigran; h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
			i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan	
24	Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	melaksanakan penyiapan bahan pengurusan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi; b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; c. melaksanakan sosialisasi program transmigrasi; d. melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi; e. melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran; f. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran; g. melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian; h. melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU); i. menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran; j. melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP); k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 	
25	Seksi Pembinaan dan Pengembangan	melakukan penyiapan bahan pengurusan pembinaan dan	a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
	Kawasan Transmigrasi	pengembangan kawasan transmigrasi	<p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;</p> <p>b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya, mental spritual dan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi (IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS);</p> <p>d. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sosial budaya, mental spritual dan ekonomi;</p> <p>f. melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi paket A (T + 1), fasilitasi bantuan saprotan;</p> <p>g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>	

TUGAS DAN FUNGSI UPTD

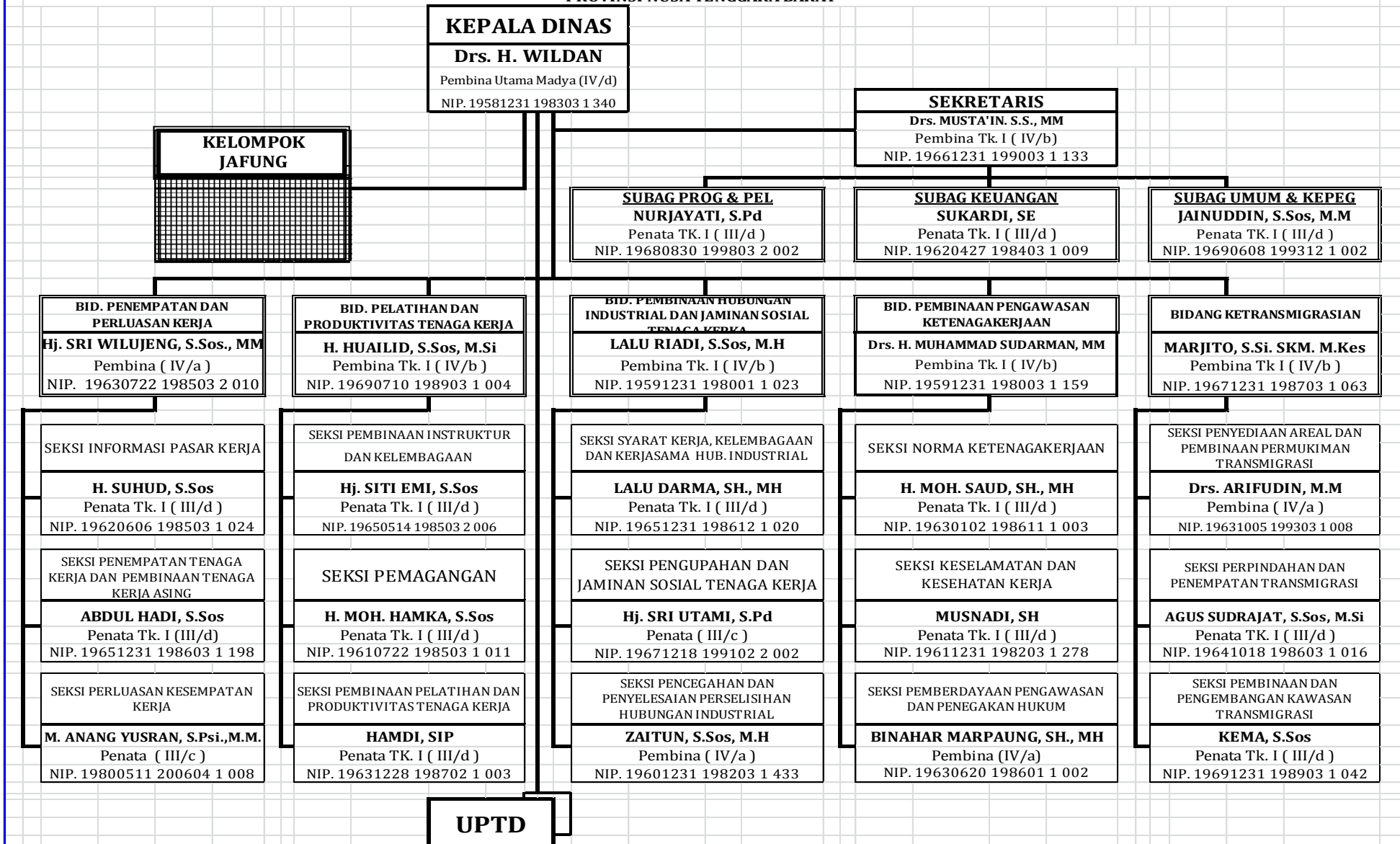
NO	UPTD	URAIAN		
		RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
1	Balai Latihan Kerja	Menyusun bahan kebijakan teknis rencana program, Pengkajian dan analisis koordinasi, fasilitasi pemantauan dan pengendalian dan pelaporan program pelatihan kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi program pelatihan kerja. 2. Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan , serta kerjasama pelatihan. 3. Menyusun dan menyebarluaskan informasi pelatihan kerja. 4. Melakukan pelatihan dan uji keterampilan/uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. 5. Mendayagunakan fasilitas pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. 6. Memantau dan mengendalikan latihan kerja. 7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja. b. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama pelatihan. c. Penyusunan penyelenggaraan dan penyebaran informasi pelatihan kerja. d. Penyusunan penyelenggaraan program pelatihan kerja dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. e. Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. f. Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja. g. Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.
	Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Meyusun bahan kebijakan tehnis, rencana program dan kegiatan, anilisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> a. Meyusun bahan rencana dan program Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja berupa RKA, DPA, RKAP dan DPPA b. Meyusun bahan rencana pelatihan dan pengujian Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja berupa Program kegiatan pelatihan dan pengujian bidang Hyperkes dan KK c. Meyusun bahan pelatihan , pemberian pelayananan konsultasi dan bantuan tehnis di bidang Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan rencana dan program Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja b. Penyusunan bahan rencana pelatihan dan pengujian Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja c. Penyusunan bahan pelatihan , pemberian pelayananan konsultasi dan bantuan tehnis di bidang Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja kepada perusahaan d. Penyusunan bahan penyelidikan dan pengujian di bidang Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja

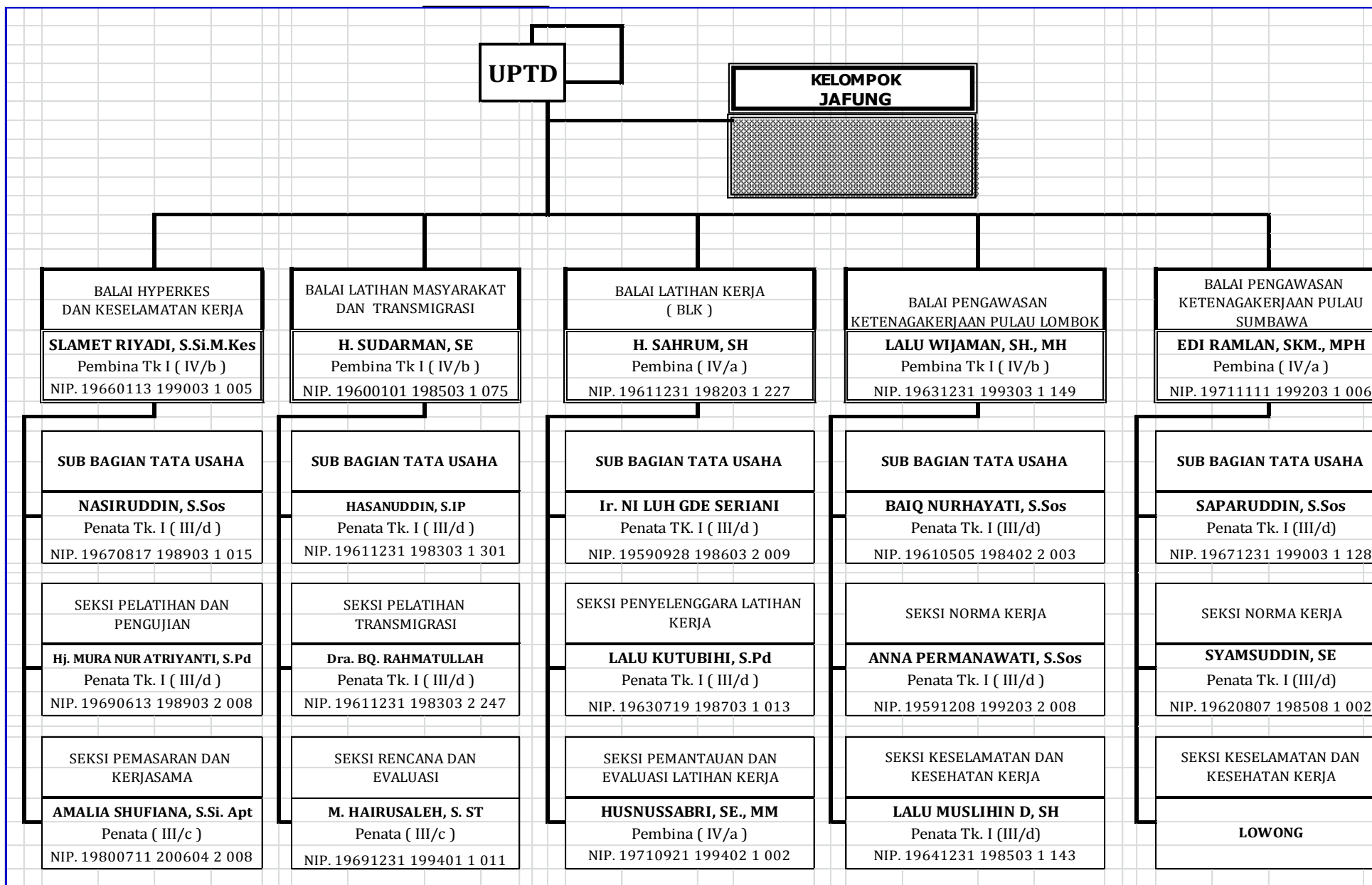
NO	UPTD	URAIAN		
		RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
			<p>berupa materi pelatihan, rekomendasi dan saran</p> <p>d. Meyusun bahan penyelidikan dan pengujian di bidang Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja berupa pedoman penyelidikan dan pengujian,</p> <p>e. Meyusun bahan pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan dan pengujian Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, terpeliharanya sarana prasarana</p> <p>f. Meyusun bahan pemantauan dan pengendalian program Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, koesioner</p> <p>g. Meyusun bahan Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Pembagian tugas dan laporan</p>	<p>e. Penyusunan bahan pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan dan pengujian Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>f. Penyusunan bahan pemantauan dan pengendalian program Higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>g. Penyusunan bahan Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan</p>
	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi	Menyusun rencana/program, pengkajian dan analisis teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi serta urusan tata usaha dan rumah tangga	<p>a. Menyusun rencana/program di bidang pelatihan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>b. Menyusun materi dan bahan pelatihan dibidang pelatihan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>c. Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan masyarakat;</p> <p>d. Menyusun pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>e. Menyusun urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD.</p>	<p>a. Penyusunan rencana/program di bidang pelatihan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>b. Penyusunan materi dan bahan pelatihan dibidang pelatihan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;</p> <p>c. Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan masyarakat;</p> <p>d. Penyusunan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>e. Penyusunan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.</p>
	Balai Pengawasan	Merumusan kebijakan	b. Merumuskan bahan perencanaan dan	a. . Perumusan bahan perencanaan dan

NO	UPTD	URAIAN		
		RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
	Ketenagakerjaan Pulau Lombok	teknis perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	<p>program pengawasan pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>c. Merumuskan pemberian pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja dan K3 dan Penegakan hukum Ketenagakerjaan diperusahaan.</p> <p>d. Merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan.</p> <p>e. Merumuskan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan Norma K3.</p> <p>f. Merumuskan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3.</p>	<p>program pengawasan , pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>b. Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan.</p> <p>c. Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan.</p> <p>d. Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan Norma K3.</p> <p>e. Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3.</p>
	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa	Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.	<p>a. Merumuskan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>b. Merumuskan pemberian pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja dan K3 dan Penegakan hukum Ketenagakerjaan diperusahaan.</p> <p>c. Merumuskan bahan pelaksanaan</p>	<p>a. Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>b. Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan.</p> <p>c. Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan.</p>

NO	UPTD	URAIAN		
		RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGI
			koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan. d. Merumuskan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan Norma K3. e. Merumuskan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3.	d. Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan Norma K3. e. Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**





2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset Yang Dikelola

1. Kepegawaian

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 197 orang aparatur yang terdiri dari laki – laki 127 orang dan perempuan 70 orang. Selanjutnya perincian sumber daya aparatur pada Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1.1. Tingkat Pendidikan

• S – 3	:	-	orang
• S – 2	:	14	orang
• S – 1	:	91	orang
• D – IV	:	0	orang
• D – III	:	12	orang
• D – II	:	-	orang
• D – I	:	-	orang
• SLTA / Sederajat	:	67	orang
• SLTP / Sederajat	:	11	orang
• SD / Sederajat	:	2	orang

1.2. Pendidikan Penjenjangan

• Diklatpim II	:	1	orang
• Diklatpim III	:	8	orang
• Diklatpim IV	:	24	orang

1.3. Golongan dan Kepangkatan

• Pembina Utama Madya (IV/d)	:	1	orang
• Pembina Utama Muda (IV/c)	:	2	orang
• Pembina Tingkat I (IV/b)	:	11	orang
• Pembina (IV/a)	:	13	orang
• (III / d)	:	50	orang
• (III / c)	:	7	orang
• (III / b)	:	39	orang
• (III / a)	:	15	orang
• (II / d)	:	7	orang
• (II / c)	:	14	orang
• (II / b)	:	22	orang
• (II / a)	:	7	orang
• (I / d)	:	2	orang
• (I / c)	:	6	orang
• (I / b)	:	-	orang
• (I / a)	:	1	orang

1.4. Esselonisasi

- Esselon II a : 1 orang
- Esselon III a : 9 orang
- Esselon IV a : 28 orang

1.5. Agama

- Islam : 157 orang
- Hindu : 35 orang
- Budha : - orang
- Kristen Protestan : 2 orang
- Kristen Katholik : 3 orang

1.6. Jabatan Struktural dan Fungsional

- Struktural : 38 orang
- Fungsional : 33 orang
- Staff : 126 orang

1.7. Umur

- 20 – 30 : 3 orang
- 31 – 40 : 53 orang
- 41 – 50 : 53 orang
- 51 – 60 : 88 orang

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai disamping dukungan sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

Tabel 1
Daftar Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	4	-	-	11.036 M ²
2	Gedung	32	-	-	32 unit
3	Mess	8	-	-	8 unit
4	Kendaraan Roda 4	3	7	-	10 unit

5	Kendaraan Roda 2	35	-	11	46 unit
No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
6	Mesin Ketik	15	2	2	19 unit
7	Komputer	65	4	6	75 unit
8	Printer	39	4	7	50 unit
9	Modem Intertnet	-	-	-	- unit
10	LCD	2	-	-	2 unit
11	Lap Top	31	-	-	31 unit
12	Stavol	21	-	-	21 unit
13	UPS	3	-	-	3 unit
14	Power Suply	6	-	-	6 unit
15	Loud Speaker sound system	4	9	7	20 unit
16	Lemari besi	-	10	23	33 unit
17	Filling besi/metal	2	16	40	58 unit
18	Lemari kayu	64	11	29	104 unit
19	Rak kayu	15	-	-	15 unit
20	Lemari arsip	12	-	-	12 unit
21	Brankas	6	10	1	17 unit
22	Filling kayu	40	-	-	40 unit
23	Meja Biro	76	-	24	100 unit
23	Meja kayu	10	-	6	16 unit
24	Permadani / gorden	2	-	-	2 buah
25	Meja Ketik	-	2	15	17 unit
26	Meja Rapat	19	-	-	19 unit
27	Meja Komputer	14	-	11	25 unit
28	Kursi Putar	16	-	4	20 unit
29	Kursi Biasa	128	-	-	128 unit
30	Buffet kayu	1	-	-	1 unit
31	Kursi Tangan	60	-	-	60 unit
32	Kursi Besi	51	3	104	158 unit
33	Kursi Lipat	299	-	-	299 unit
34	Kursi Tamu	4	-	20	24 unit
35	Kipas Angin	25	1	-	26 unit

36	Wirless	3	1	13	17 unit
No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		B	RR	RB	
37	Televisi	7	-	1	8 unit
38	White Board	-	3	24	27 buah
39	Papan Visual	9	1	-	10 buah
40	Peta	11	1	-	12 buah
41	Jam Dinding	-	28	-	28 buah
42	AC	54	8	22	84 unit
43	Dispencer	5	-	-	5 buah
44	Kulkas	3	-	2	5 unit
45	Alat las listrik	-	1	-	1 unit
46	Camera Video	-	5	-	5 unit
47	Handycam	-	4	-	4 unit
48	Kamera	4	6	4	14 unit
49	Faximile	1	-	6	7 unit
50	Interphone	9	-	-	9 unit
51	Mic	10	1	-	11 buah

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Tabel 2
JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN

NO.	BIDANG / UPTD	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Sekretariat	membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor	Aparatur Sipil Negara lingkup Disnakertrans
2	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	menyediakan informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan	Pencari kerja, Calon TKI, TKI, TKA

NO.	BIDANG / UPTD	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
		perlindungan tenaga kerja, pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal.	
3	Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.	Pencari Kerja, Calon TKI dan TKI Purna
4	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan industrial, pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial (kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial).	Perusahaan dan Tenaga Kerja
5	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.	Perusahaan dan Tenaga Kerja
6	Bidang Ketransmigrasian	Melaksanakan perumusan kebijakan, Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman, perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.	Masyarakat dan Transmigran
7	Balai Latihan Kerja NTB	Menyusun bahan kebijakan teknis rencana program, Pengkajian dan	Masyarakat dan Pencari Kerja

NO.	BIDANG / UPTD	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
		analisis koordinasi, fasilitasi pemantauan dan pengendalian dan pelaporan program pelatihan kerja.	
8	Balai Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;	Melaksanakan pengujian di bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan menggunakan fasilitas laboratorium	Perusahaan dan Tenaga Kerja
9	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi;	Melaksanakan pelatihan dan pendidikan bidang Ketramigrasian	Masyarakat dan Transmigran
10	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok	Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan diPulau Lombok	Perusahaan dan Tenaga Kerja di Pulau Lombok
11	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa	Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan diPulau Sumbawa	Perusahaan dan Tenaga Kerja di Pulau Sumbawa

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait Dengan Pelayanan

Dalam kurun waktu *lima tahun* ke depan, persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagai urusan wajib dan ketransmigrasian sebagai urusan pilihan mencakup:

- a. Secara demografis, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 4.773.795 jiwa, terdiri atas 2.315.234 jiwa laki-laki dan 2.458.561 jiwa perempuan. Pulau Lombok dengan luas daratan 4.738,70 km persegi (22,78 %) berpenduduk 3.352.988 jiwa (70,24 %), sedangkan Pulau Sumbawa yang luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22 %) hanya berpenduduk 1.420.807 jiwa (29,76 %).
- b. Terjadinya transformasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) yang tidak diiringi dengan transformasi ketenagakerjaan maupun pertumbuhan sektor sekunder dan tersier yang tidak diimbangi oleh kualitas tenaga kerja, berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Ketimpangan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum optimal dan pembangunan infrastruktur pendukungnya yang belum memadai.
- d. Tujuan umum pembangunan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah membentuk iklim social ekonomi dan budaya yang mendukung produktivitas tenaga kerja sehingga dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera, sedangkan tujuan umum bidang pembangunan bidang ketransmigrasian adalah fasilitasi perpindahan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan secara asri dan lestari sehingga transmigran dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera.
- e. Sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan, sedangkan sasaran pembangunan bidang ketransmigrasian adalah meningkatnya kemampuan dan kemandirian transmigran dalam mengembangkan usahanya di lingkungan permukiman baru.

Dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran pembangunan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

menetapkan program dan kegiatan yang didukung oleh dana APBD Provinsi NTB dan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

3.2. Hasil-Hasil Yang Dicapai Lima Tahun Terakhir (2012-2016)

I. KETENAGAKERJAAN

a. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Jumlah TKA yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB sebanyak 226 orang. Masing-masing bekerja pada Sektor Jasa sebanyak 66 orang, Sektor Bangunan sebanyak 27 orang, Sektor Perdagangan sebanyak 33 orang, Sektor Angkutan sebanyak 40 orang, Sektor Keuangan sebanyak 12 orang dan Sektor Pertambangan sebanyak 15 orang.

b. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Perkembangan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui LTSP sebagai berikut :

1. Penempatan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri rincian sebagai berikut :

- Tahun 2012 sebanyak 37.020 Orang terdiri dari Laki-laki 45.397 Orang dan Perempuan 5.483 orang
- Tahun 2013 sebanyak 45.699 Orang terdiri dari Laki-laki 36.702 Orang dan Perempuan 8.997 orang
- Tahun 2014 sebanyak 46.187 Orang terdiri dari Laki-laki 36.219 Orang dan Perempuan 9.968 orang
- Tahun 2015 sebanyak 35.312 Orang terdiri dari Laki-laki 28.556 Orang dan Perempuan 6.756 orang
- Tahun 2016 sebanyak 27.695 Orang terdiri dari Laki-laki 22.581 Orang dan Perempuan 5.114 orang

2. PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta).

Upaya pembinaan dan penertiban PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang beroperasi di NTB terus dilakukan secara koordinatif bersama BP3TKI, Kepolisian Daerah NTB, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan unit terkait lainnya yang tergabung

dalam Satgas Penanganan TKI Terhadap PPTKIS yang nakal/kurang bertanggung jawab (*mengalihkan negara tujuan, memalsukan dokumen, mengabaikan TKI dan lain-lain*) dibekukan aktifitasnya. Perkembangan jumlah PPTKIS adalah :

- Tahun 2012 sebanyak 146 PPTKIS
- Tahun 2013 sebanyak 184 PPTKIS
- Tahun 2014 sebanyak 194 PPTKIS
- Tahun 2015 sebanyak 177 PPTKIS
- Tahun 2016 sebanyak 186 PPTKIS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, BP3TKI. APJATI Pusat dan APJATI NTB juga telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi para Pelaksana Lapangan (PL) PPTKIS sebagai perekrut langsung CTKI di lapangan. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir beroperasinya calo-calo tenaga kerja liar yang mengatasnamakan PPTKIS tertentu.

3. *TKI Deportasi*

Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan terhadap TKI melalui LTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BNP2TKI, BP3TKI, Kepolisian, Dinas Sosial dan perusahaan angkutan darat untuk pemulangan TKI Deportasi, baik yang berasal dari Malaysia maupun Timur Tengah.

Data berikut menunjukkan jumlah pemulangan TKI dimaksud :

Tahun 2013 sebanyak 2.447 orang

Tahun 2014 sebanyak 3.130 orang

Tahun 2015 sebanyak 2.408 orang

Tahun 2016 sebanyak 2.721 orang

4. *TKI Berkasus Hukum*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak ada TKI berkasus hukum di negara penempatan. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi, pembekalan dan pembinaan kepada TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

a. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebagai hasil kerjasama PPTKIS dengan Perkebunan di provinsi lain dapat terealisasi sebanyak 4.856 orang, masing-masing Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.514 orang, Kalimantan Barat sebanyak 563 orang, Kalimantan Tengah sebanyak 951 orang dan Kalimantan Timur sebanyak 922 orang, yang ditempatkan pada sektor perkebunan kelapa sawit.s

b. Remitansi

Remitansi atau pengiriman uang yang dikirim oleh TKI dari negara-negara Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Jordan, Korea, Malaysia, Brunei, Filipina, Hongkong, Jepang, Singapura dan negara lain ke tanah air khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2013-2016, baik yang dikirim melalui BI dan Pos., sebagaimana terlihat pada data berikut :

Tahun 2013 sejumlah Rp398.477.401.357,00

Tahun 2014 sejumlah Rp1.405.855.774.681,85

Tahun 2015 sejumlah Rp1.706.126.895.898,23

Tahun 2016 sejumlah Rp1.780.059.904.247,46

c. Pelatihan

Program pelatihan yang dilakukan dalam upaya menyesuaikan tuntutan pasar kerja dengan ketrampilan tenaga kerja (*link and match*) di NTB antara lain dengan mengoptimalkan fungsi BLK/LLK/KLK baik milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagai mitra kerja pemerintah. Optimalisasi tersebut dengan cara menerapkan sistem pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja. Akumulasi jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dirinci sebagai berikut :

- BLK/LLK/KLK Pemerintah : 22.303 orang
- LPKS : 29.444 orang
- Pemagangan Dalam Negeri : 1.900 orang
- Pemagangan Luar Negeri : 191 orang

Selain pelatihan kompetensi dan magang, melalui dukungan APBN juga telah dilaksanakan berbagai pelatihan di kabupaten/kota, bekerjasama dengan

dinas yang menangani ketenagakerjaan kabupaten/kota se-NTB, Dinas Koperasi UKM dan Disperindag.

Hal lain yang dilakukan terkait dengan pelatihan kompetensi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB mendorong tumbuh kembangnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

d. Hubungan Industrial

1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memfasilitasi kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja/buruh penerima gaji/upah (dalam hubungan kerja) menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 63.395 orang.

2. Penyelesaian Hubungan Industrial

Dalam Hubungan Industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja terjadi pula perselisihan; terdapat 169 kasus perselisihan yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB. Di antara kasus-kasus tersebut, sebanyak 19 [sembilan belas] kasus dapat diselesaikan secara Bipartit melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; dan 146 [seratus empat puluh enam] kasus dapat diselesaikan melalui mediasi oleh fungsional mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

II. KETRANSMIGRASIAN

1. Pemandahan dan Penempatan Transmigran

Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB selama lima tahun terakhir, baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi adalah 490 KK atau 2.121 jiwa, dengan sebaran penempatan di dalam provinsi yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; sedangkan di luar Provinsi NTB yaitu ke Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.1
Capaian Indikator RPJMD
Tahun 2013-2018

URAIAN	KONDISI AWAL 2008	2014		2015		2016		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
TPT (%)	6,48	4,62	5,75	4,62	5,69	5,64	3,94	4,82		4,55	

3.3. Penentuan Isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku organisasi perangkat daerah yang membantu Gubernur Nusa Tenggara Barat urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan pelayanan administrasi pemerintahan maupun pembinaan aparatur sipil negara yang belum optimal, perluasan dan kesempatan kerja yang masih terbatas, kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan yang rendah, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kurang harmonis, pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang kurang memadai, pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang terbatas.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, beberapa isu – isu strategis yang menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013- 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembinaan kualitas sumberdaya manusia.
2. Perluasan kesempatan kerja dalam dan luar Negeri.
3. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan.
4. Peningkatan keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
6. Peningkatan pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Gambaran keterkaitan antara permasalahan dan isu terkait penyusunan rencana strategis Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sebagai berikut;

Tabel 3.3
KETERKAITAN MASALAH DENGAN ISU

NO.	BIDANG/UPTD	MASALAH	ISU
	Sekretariat	pelayanan administrasi pemerintahan maupun pembinaan aparatur sipil negara yang belum optimal	Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembinaan kualitas sumberdaya manusia
	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	perluasan dan kesempatan kerja yang masih terbatas	Perluasan kesempatan kerja dalam dan luar Negeri
	Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan yang rendah	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan
	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kurang harmonis	Peningkatan keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
	Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang kurang memadai	Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan
	Bidang Ketransmigrasian	pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang terbatas	Peningkatan pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Analisis Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “ **Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera** “.

Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yakni: Masyarakat NTB, seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat, diharapkan :

1. Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
2. Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
3. Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global.
4. Sejahtera, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan visi yaitu “ **Mewujudkan Tenaga Kerja dan Transmigran di Nusa Tenggara Barat yang Produktif dan Sejahtera**“.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi Gubernur Nusa Tenggara Barat, ditetapkan beberapa misi yaitu :

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berdasarkan misi-misi di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pencapaian misi nomor 4 [empat] yaitu “meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing”.

Dukungan pelaksanaan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut tergambar dalam misi-misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 yaitu

1. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan pembinaan kualitas sumberdaya manusia.
2. Perluasan kesempatan kerja dalam dan luar Negeri.
3. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan.
4. Peningkatan keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
6. Peningkatan pembinaan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

3. Program Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan beberapa program prioritas pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 3) Perlindungan dan pengembangan lembaga Tenaga Kerja
- 4) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

- 5) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 6) Peningkatan kesempatan kerja
- 7) Pengembangan wilayah transmigrasi
- 8) Penempatan dan pembinaan transmigrasi

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas program dan pelaporan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, pembinaan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana perkantoran
4. Meningkatkan efektifitas penyebaran informasi pasar kerja.
5. Meningkatkan kualitas penempatan dan pembinaan tenaga kerja.
6. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja
7. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan LTSP.
8. Meningkatkan kualitas instruktur dan lembaga pelatihan
9. Meningkatkan kualitas pembinaan pemagangan tenaga kerja
10. Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
11. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan BLK
12. Meningkatkan kualitas pelaksanaan syarat kerja hubungan industrial.
13. Meningkatkan perlindungan dan kelayakan jaminan sosial ketenagakerjaan.
14. Meningkatkan efektifitas pencegahan perselisihan hubungan industrial.
15. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan Balai Hiperkes.
16. Meningkatkan pembinaan penerapan norma-norma ketenagakerjaan
17. Meningkatkan pengawasan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
18. Meningkatkan koodinasi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
19. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan [Balai Wasnaker]
20. Meningkatkan kualitas penyiapan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi
21. Meningkatkan kualitas pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi.
22. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

23. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelayanan Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi [Balatmastrans]

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas program dan pelaporan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, pembinaan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana perkantoran
4. Meningkatnya efektifitas penyebaran informasi pasar kerja.
5. Meningkatnya kualitas penempatan dan pembinaan tenaga kerja.
6. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
7. Meningkatnya kualitas dan fungsi pelayanan LTSP.
8. Meningkatnya kualitas instruktur dan lembaga pelatihan
9. Meningkatnya kualitas pembinaan pemagangan tenaga kerja
10. Meningkatnya kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
11. Meningkatnya kualitas dan fungsi pelayanan BLK
12. Meningkatnya kualitas pelaksanaan syarat kerja hubungan industrial.
13. Meningkatnya perlindungan dan kelayakan jaminan sosial ketenagakerjaan.
14. Meningkatnya efektifitas pencegahan perselisihan hubungan industrial.
15. Meningkatnya kualitas dan fungsi pelayanan Balai Hiperkes.
16. Meningkatnya pembinaan penerapan norma-norma ketenagakerjaan
17. Meningkatnya pengawasan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
18. Meningkatnya koodinasi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
19. Meningkatnya kualitas dan fungsi pelayanan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan [Balai Wasnaker]
20. Meningkatnya kualitas penyiapan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi
21. Meningkatnya kualitas pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi.
22. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
23. Meningkatnya kualitas dan fungsi pelayanan Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi [Balamastrans]

Untuk mencapai sasaran jangka menengah, maka disusun strategi dan kebijakan organisasi sebagai berikut :

4.3. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Dari berbagai paparan tersebut di atas maka yang menjadi strategi pilihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- 1.1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dan fasilitasi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan instansi terkait, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten / kota.
- 1.2. Melaksanakan pelayanan maksimal terhadap pencari kerja dan peserta magang dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 1.3. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan pelatihan produktifitas maupun keterampilan yang mendukung kemandirian tenaga kerja dan transmigran.
- 1.4. Meningkatkan pembinaan norma kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.

2. Kebijakan

- 2.1. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD NTB dan Rencana Strategis Dinas.
- 2.2. Mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan pihak terkait, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten / kota.
- 2.3. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi program dan kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam jangka waktu dua tahun mendatang, dari tahun 2017 sampai dengan 2018, program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi :

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
2.01 . 2.01.01. 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mataram	2 Unit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	6	Penyediaan alat tulis kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mataram	1 tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	10	Penyediaan makanan dan minuman	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	11	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Mataram / Prov Lainnya	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	12	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	13	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan	Se NTB	1 Tahun

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
		Kabupaten/Kota		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22	14	Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2.01 . 2.01.01 . 02 . 03	15	Pembangunan gedung kantor	Mataram	2 Paket
2.01 . 2.01.01 . 02 . 05	16	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Mataram	2 Unit
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	18	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	19	Pengadaan mebeleur	Mataram	2 Paket
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13	20	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	23	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30	24	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 02 . 38	25	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 03		Program peningkatan disiplin aparatur		
2.01 . 2.01.01 . 03 . 01	26	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Mataram	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01	27	Pendidikan dan pelatihan	Se-NTB	1 Tahun

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
		formal		
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04	28	Pembangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah	Mataram	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 05 . 06	29	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Mataram	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 05 . 07	30	Penilaian kinerja SKPD	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 05 . 08	31	Peningkatan SDM Aparatur	Mataram	
2.01 . 2.01.01 . 06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01	32	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Mataram	142 Buku
2.01 . 2.01.01 . 06 . 03	33	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Mataram	15 Buku
2.01 . 2.01.01 . 06 . 04	34	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	37 Buku
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05	35	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Mataram	40 Buku
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08	36	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Se NTB	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09	37	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Se NTB	1 Tahun
3.08 . 2.01.01 . 07		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		
3.08 . 2.01.01 . 07 . 01	38	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	se NTB.	1 Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02	39	Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Mataram	1 Tahun
2.01 . 2.01.01 . 08		Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan		
2.01 . 2.01.01 . 08 . 11	40	Penyusunan Perencanaan		1 Tahun

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Program/Kegiatan		
2.01 . 2.01.01 . 08 . 12	41 Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Mataram	60 Orang
2.01 . 2.01.01 . 08 . 13	42 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Mataram	20 Buku
2.01 . 2.01.01 . 08 . 14	43 Profil Ketenagakerjaan	Mataram	20 Buku
2.01 . 2.01.01 . 08 . 15	44 Penyusunan Profil UPT Bina	UPT	3 UPT
2.01 . 2.01.01 . 08 . 16	45 Penyelenggaraan Transmigrasi	Mataram	2 Laporan
3.08 . 2.01.01 . 15	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01	46 Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pengurusan Penertiban SK HPL	UPT	3 Paket
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02	47 Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)	Se NTB	150 orang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 03	48 Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) dan Pemandahan Catrans	Mataram	1 Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 04	49 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Bina	UPT	1 Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	50 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	KTM	1 Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06	51 Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan/Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	UPT	1 Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 07	52 Monitoring dan Evaluasi	UPT	50 Orang

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
	Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Transmigran		
3.08 . 2.01.01 . 15 . 10	53 Penyuluhan Calon Transmigrasi (Catrans)	Se NTB	125 Orang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 11	54 Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi	Mataram	140 Orang
3.08 . 2.01.01 . 15 . 12	55 Evaluasi Lokasi Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)	UPT	3 Lokasi
3.08 . 2.01.01 . 15 . 13	56 Pengurusan Penertiban SKHPL	UPT	4 Lokasi
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02	57 Optimalisasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KALPK)	Mataram	15 Lembaga
2.01 . 2.01.01 . 15 . 05	58 Expo Pemagangan dalam dan luar negeri	Mataram	350 orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	59 Sosialisasi Seleksi Daerah Calon Kompotitor (Asean Skill Competition) ASC	Se NTB	200 Orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 07	70 Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	Se NTB	228 Orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 08	71 Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri	Mataram	50 orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13	72 Rekrutment dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	Mataram	200 orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14	73 Sinkronisasi Kebutuhan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Se NTB	10 kab/kota
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15	74 Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan	Mataram	30 orang

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
2.01 . 2.01.01 . 15 . 16	75	Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi se NTB	Se NTB	30 Orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 18	76	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Se NTB	1 Laporan
2.01 . 2.01.01 . 15 . 21	77	Pembinaan Desa Produktif	Se NTB	20 orang
2.01 . 2.01.01 . 16		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja		
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04	78	Penanganan TKI Bermasalah	Mataram	2.475 Orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	79	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Mataram	3.5312 Orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 07	80	Terapan Teknologi Tepat Guna(TTG)	Se NTB	20 Orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10	81	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Mataram	150 Orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13	82	Monitoring dan Evaluasi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Mataram	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17	83	Pelatihan kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Se NTB	200 Orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18	84	Padat Karya Produktif (DBHCHT)	Se NTB	800 orang / 8 lokasi
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20	85	Informasi Pasar Kerja (Job Fair) (DBHCHT)	Se NTB	7000 orang/ 2 kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 22	86	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (DBHCHT)	Se NTB	160 orang
2.01 . 2.01.01 . 16 . 23	87	Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	NTB / Provinsi Lainnya	40 orang / 2 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 16 . 24	88	Informasi Pasar Kerja (IPK)		20 Buku

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
2.01 . 2.01.01 . 17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 05	89	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Se NTB.	11 Lembaga
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	90	Pemberdayaan Ketenagakerjaan pada Peringatan Hari Buruh Internasional	Mataram	200 Orang
2.01 . 2.01.01 . 17 . 13	91	Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	Se NTB.	10 Kab / Kota
2.01 . 2.01.01 . 17 . 22	92	Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Se NTB	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 23	93	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Se NTB	20 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 24	94	Peningkatan Kepersertaan JAMSOSTEK bagi pengusaha dan pekerja di Perusahaan Tembakau	Se NTB	20 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18		Program Pengawasan Ketenagakerjaan		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01	95	Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3	Se NTB	25 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02	65	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Se NTB	20 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03	97	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan	Se NTB	20 Perusahaan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA
		Kerja (K3) di Perusahaan		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04	98	Pengawasan dan Pemeriksaan tempat Penampungan CTKI		3 Provinsi
2.01 . 2.01.01 . 18 . 05	99	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Mataram	1 Kegiatan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 06	100	Pengawasan dan Pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan tembakau	Se NTB	25 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07	101	Pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan	Se NTB	25 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 08	102	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan rokok dan tembakau	Pulau Lombok	25 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 09	103	Pemetaan Kasus ketenagakerjaan	Se NTB	25 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 10	104	Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Mataram	1 Kasus
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11	105	Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok	Pulau Lombok	40 Perusahaan
2.01 . 2.01.01 . 18 . 12	106	Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa Bagian Barat	Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat	20 Perusahaan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
Meningkatnya kualitas pelayanan umum, pembinaan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana perkantoran	Pelayanan umum, pembinaan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana perkantoran	1 14 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									Sekretariat	
		1 14 1 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 Bln	20.000.000	27.500.000	4.350.000	2750000	36.602.500	12 Bln		
		1 14 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya jasa fasilitas kantor	12 Bln	177.000.000	277.000.000	271.292.000	245400000	368.687.000	12 Bln		
		1 14 1 1 6	Penyediaan jasa dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas dan pemeliharaannya dapat berjalan baik	12 Bln	132.235.000	185.500.000	12.065.000	14800000	246.900.500	12 Bln		
		1 14 1 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	12 Bln	76.080.000	96.000.000	82.157.400	94011000	127.776.000	12 Bln		
		1 14 1 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	12 Bln	150.810.000	215.000.000	253.900.000	284308000	286.165.000	12 Bln		
		1 14 1 1 10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Terbelinya alat tulis kantor	12 Bln	57.800.000	78.500.000	39.650.300	39650100	104.483.500	12 Bln		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 1 11	Penyediaan Jasa Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan kantor Dinas	12 Bln	67.000.000	97.250.000	57.425.000	61999750	61.999.750	12 Bln		
		1 14 1 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana penerangan	12 Bln	25.000.000	50.000.000	52.736.000	62665500	66.550.000	12 Bln		
		1 14 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi yang menunjang kegiatan dinas	12Bln	26.500.000	36.000.000	15.960.000	27440000	47.916.000	12 Bln		
		1 14 1 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya makan dan minum kantor	12 Bln	50.000.000	65.000.000	59.000.000	69000000	86.515.000	12 Bln		
		1 14 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksana-nya konsultasi dan koordiansi ke luar daerah	12 Bln	180.000.000	195.000.000	148.513.500	135350450	259.545.000	12 Bln		
		1 14 1 1 19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pegawai non PNS	12 Bln	107.300.000	117.300.000	91.000.000	91000000	156.126.300	12 Bln		
		1 14 1 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksana-nya koordinasi ke dalam daerah	12 Bln	180.000.000	180.000.000	139.914.000	135000000	239.580.000	12 Bln		
		1 14 1 1 21	Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	Tersedianya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	12 Bln	-	70.000.000		15000000	93.170.000	12 Bln		
		1 14 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									Sekre tariat	

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksana-nya perencanaan pem-bangunan gedung	3 Pkt	154.524.200	173.000.000	423.090.000	97200000	230.263.000	3 Pkt		
		1 14 1 2 13	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksana-nya pengadaan laptop, AC, kipas angin, printer, UPS dan stavol, LCD proyektor, almari dan komputer	1 Thn	401.508.100	461.500.000	387.010.000		114.700.000	1 Thn		
		1 14 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana gedung kantor	12 Bln	300.000.000	330.000.000	272.540.000		25.000.000	12 Bln		
		2 01 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	12 Bln	183.535.000	185.000.000	151.140.000		168.189.000	12 Bln		
		2 01 01 02 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	Terlaksananya pemerliharan mebel	12 Bln					15.000.000	12 Bln		
		1 14 1 2 30	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksana-nya pemeli-haraan secara rutin/berkala	12 Bln	45.700.000	40.500.000	59.650.000	101.400.000	39.650.100	12 Bln		
		1 14 1 2 38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Pemeliha-raan arsip	12 Bln	21.000.000	17.000.000	17.000.000	9.000.000	33.275.000	12 Bulan		
		2 01 01 02 10	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel	2 Paket			163.900.000	70.700.000	125.000.000	2 Pkt		
		1 14 1 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									Sekre tariat	
		1 14 1 3 1	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksana-nya pembinaan mental dan fisik Aparatur	1 Keg	30.000.000	30.000.000	38.150.000	25.150.000	39.930.000	1 Keg		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnakertrans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	37 Bk	20.000.000	22.500.000	31.000.000	39.488.000	29.947.500	37 Bk		
		1 14 1 6 5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	40 Bk	65.272.000	72.000.000	71.883.700	81.284.000	95.832.000	40 Bk		
		1 14 1 6 8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	4 Kali	52.185.000	58.000.000	59.950.000	47.081.800	77.198.000	4 KI		
		1 14 1 6 9	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (SIMNAKERTRANS)	12 Bln	288.654.300	325.000.000	241.533.000	214.100.000	432.575.000	12 Bln		
		1 14 1 7 1	Peningkatan Manajemen Asset/Milik Daerah	Terlaksananya Peningkatan Asset /Barang Milik Negara	1 Keg.	64.750.000	72.500.000	23.680.000	68.581.800	96.497.500	1 Keg.		
		1 14 1 7 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pembinaan Keuangan dan Stakeholder di lingkungan Disnakertrans	12 Bln	50.605.000	72.500.000	60.000.000		96.497.500	12 Bln		
Meningkatnya kualitas program dan pelaporan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Program dan pelaporan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian		Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan										
		2 01 01 08 11	Penyusunan perencanaan program/ kegiatan	Tersusunnya dokumen perencanaan program/kegiatan	1 Thn			147.627.000	139.762.300	150.000.000	1 Thn		
		2 01 01 08 12	Pengendalian ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Terlaksananya pengendalian kegiatanketenagakerjaan dan ketransmigrasian	60 Org	161.362.500		30.840.500	54.460.700	100.000.000	60 Org		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		2 0 01 08 13	Penyusunan rencana tenaga kerja daerah	Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja daerah	20 Bk				108.910.500	135.750.000	20 Bk		
		2 01 01 08 14	Profil ketenagakerjaan	Tersusunnya dokumen profil ketenagakerjaan	20 Bk				44.938.300	75.555.000	20 Bk		
		2 01 01 08 15	Penyusunan profil UPT Bina	Tersusunnya dokumen profil UPT Bina	3 UPT	56.000.000	63.915.000	56.911.000	45.835.000	60.550.000	3 UPT		
		2 01 01 08 16	Penyenggaraan Transmigrasil	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan transmigrasi	2 Lap	1.201.946.000			55.062.900	60.000.000	2 Lap		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi		Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi										
		2 01 01 15 01	Optimalisasi pertanahan transmigrasi, izin prinsip pelepasan kawasan hutan [IPPKH] dan pengurusan penerbitan SK HPL	Terbitnya izin prinsip pelepasan kawasan hutan	3 Pkt		131.062.500		116.556.600	145.550.000	3 Pkt		
		2 01 01 15 02	Penyuluhan dan seleksi calon transmigran	Terlaksananya penyuluhan dan seleksi catrans	150 Org		44.870.000	63.835.000	69.117.000	74.000.000	150 Org		
			Pengarahan dan penempatan transmigran	Terlaksananya pengarahan dan penempatan transmigran	150 Org		23.630.000	53.910.000		60.000.000	150 Org		
		2 01 01 15 03	Naskah kerjasama antar daerah [NKSAD] dan pemindahan catran	Terbitnya naskah kerjasama antar daerah untuk pengarahan transmigrasi	1 Keg	62.310.000			58.594.600	74.567.000	1 Keg		
		2 01 01 15 04	Pengembangan dan pemberdayaan	Terlaksananya pemberdayaan	1 Keg	112.080.000		126.950.000	100.473.900	125.125.000	1 Keg		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
			pemberdayaan masyarakat transmigrasi di UPT Bina	masyarakat transmigran di UPT Bina									
		2 01 01 15 05	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan KTM	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat transmigran di kawasan KTM	1 Keg	172.784.000			110.870.000	125.500.000	1 Keg		
		2 01 01 15 06	Pengembangan sarana dan prasana dan pengelolaan / pelayanan pertanahan transmigrasi	Terbangunannya sarana prasarana pengelolaan pertanahan transmigrasi	1 Keg			200.000.000	61.836.400	86.560.000	1 Keg		
		2 01 01 15 07	Monitoring dan evaluasi program pengembangan wilayah dan pemberdayaan transmigrasi	Terlaksananya monev program pemberdayaan transmigrasi	50 Org	41.552.500		40.000.000	15.000.000	60.552.000	50 Org		
Meningkatnya kualitas instruktur dan lembaga pelatihan	Kualitas instruktur dan lembaga pelatihan	1 14 1 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									Bid. Pelatihan & Produk. Tenaga Kerja	
		1 14 1 15 4	Mediasi Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya pelatihan, sertifikasi dan penempatan ketenagakerjaan	70 Org	220.000.000	245.000.000	269.500.000	296.450.000	326.095.000	70 Org		Prov.
		2 01 01 15 07	Pemberdayaan lembaga pelatihan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga pelatihan	228 Org			50.000.000	107.973.700	125.500.000	228 Org		
		2 01 01 15 15	Peningkatan kompetensi pengelola pelatihan	Terlaksananya pelatihan kompetensi pengelola pelatihan	30 Org			165.528.000	66.699.000	150.000.000	30 org		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 15 5	Sosialisasi ekspo pemagangan dalam dan luar negeri	Terselenggaranya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	50 Org	25.000.000	27.500.000	59.000.000	33.275.000	36.602.500	50 Org	Prov.	
		1 14 1 15 13	Rekrutmen dan seleksi pemagangan luar negeri (Jepang)	Terselenggaranya rekrutmen pemagangan luar negeri (Jepang)	200 Org	86.750.000	95.425.000	107.197.900	115.464.250	127.010.675	200 Org	Prov.	
		1 14 1 15 14	Sinkronisasi kebutuhan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Terselenggaranya sinkronisasi program pelatihan produktivitas tenaga kerja	10 Kab/ Kota	51.000.000	56.100.000	43.000.000		74.669.100	10 Kab/ Kota	Kab/ Kota	
		1 14 1 15 15	Pembinaan dan Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Terselenggaranya pembinaan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	70 Org	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	322.102.000	70 Org	Kab/ Kota	
		1 14 1 15 18	Monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas	12 Bln	42.967.000	55.000.000	35.000.000	15.000.000	73.205.000	12 Bln	Prov.	
		1 14 1 15 19	Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Terselenggaranya Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	25 Org	100.000.000	110.000.000	121.000.000		146.410.000	25 Org	Prov	
		1 14 1 15 20	Pembentukan desa produktif	Terlaksananya pembentukan desa produktif	10 Desa	-	110.000.000	124.000.000		146.410.000	10 Desa	Kab/ Kota	
		1 14 1 15 21	Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition (5 kejuruan=50	Terlaksananya Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills Competition	50 Org	-	290.000.000	319.000.000	350.900.000	385.990.000	50 Org	Prov.	

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
			Orang)										
		1 14 1 15 22	Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)	Terlaksananya Optimalisasi Komite Akreditasi LPK (KA-LPK)	10 Lbg	-	25.000.000	46.679.300	165.077.200	33.275.000	10 Lbg		Prov.
		1 14 1 15 23	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Terlaksananya Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	200 Org	-	650.000.000	715.000.000	786.500.000	865.150.000	200 Org		Prov.
		1 14 1 15 24	Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	100 Org	-	325.000.000	327.080.000	349.124.600	432.575.000	100 Org		Prov
		1 14 1 15 25	Upgrading pengelola pelatihan	Terlaksananya Upgrading pengelola pelatihan	125 Org	-	165.000.000	181.500.000		219.615.000	125 Org		Prov
		1 14 1 15 26	Upgrading instruktur lembaga pelatihan	Terlaksananya upgrading instruktur lembaga pelatihan	250 Org	-	165.000.000	181.500.000		219.615.000	250 Org		Prov.
		1 14 1 15 27	Kajian profil potensi SDM NTB yang berkompeten	Terlaksananya kajian profil potensi SDM NTB yang berkompeten	25 Bk	-	55.000.000	60.500.000		73.205.000	25 Bk		Prov.
		1 14 1 15 28	Sosialisasi sertifikasi kompetensi se NTB	Terlaksananya sosialisasi sertifikasi kompetensi se NTB	10 Kab/Kota	-	165.000.000	181.500.000		219.615.000	10 Kab/Kota		Prov.
			Pelatihan Berbasis Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	5 Akt	90.000.000	100.000.000	115.000.000		134.000.000	5 Akt		Prov.
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Kualitas pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	1 14 1 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									Bid. Pengembangan Kawasan Trans migrasi	

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 15 1	Perencanaan dan Penyusunan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tersusunnya dokumen program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	25 Bk	141.555.000	161.555.000	177.710.500		215.029.705	25 Bk		Prov.
		1 14 1 15 4	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat transmigran	5 UPT	108.105.000	150.000.000	126.950.000		199.650.000	5 UPT		UPT Bina
		1 14 1 15 5	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Transmigran	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemberdayaan transmigrasi	6 Kl	50.000.000	55.000.000	60.500.000		73.205.000	6 Kl		Prov
		1 14 1 15 6	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan KTM	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan KTM	2 KTM	158.940.000	195.000.000	153.003.600		259.545.000	2 KTM		KTM Tambora & KTM Labangka
		1 14 1 15 7	Pendampingan pengembangan usaha ekonomi di KTM	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi di KTM	2 KTM	-	150.000.000	165.000.000		199.650.000	2 KTM		KTM Tambora & KTM Labangka
		1 14 1 15 8	Pengadaan tanaman komoditas unggulan di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya pengadaan tanaman komoditas unggulan di KTM	2 KTM	-	195.000.000	214.500.000		259.545.000	2 KTM		KTM Tambora & KTM Labangka
		1 14 1 15 9	Bimtek/sosialisasi pengembangan tanaman komoditas unggulan di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya Bimtek pengembangan tanaman komoditas unggulan di UPT	5 UPT	-	150.000.000	165.000.000		199.650.000	5 UPT		UPT di P. Lombok & P. Sumbawa

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 15 10	Rehab sarana air bersih (SAB) di UPT	Terlaksananya Rehab SAB di UPT	5 UPT	-	190.000.000	209.000.000		252.890.000	5 UPT	UPT di P. Lombok & P. Sumbawa	
		1 14 1 15 11	Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya Rehab sarana dan prasarana jalan, jembatan dan gorong-gorong di UPT/kawasan KTM	5 UPT Bina & 2 KTM	-	190.000.000	209.000.000		252.890.000	5 UPT Bina & 2 KTM	UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa, KTM Tambora & Labangka	
		1 14 1 15 12	Rehab bangunan fasilitas umum di UPT/kawasan KTM	Terlaksananya rehab bangunan Fasum di UPT/KTM	5 UPT Bina & 2 KTM	-	175.000.000	192.500.000		232.925.000	5 UPT Bina & 2 KTM	UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa, KTM Tambora & Labangka	
		1 14 1 15 13	Bimtek/sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana UPT	Terlaksananya Bimtek/sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana UPT	5 UPT	-	150.000.000	165.000.000		199.650.000	5 UPT	UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa	
		1 14 1 15 14	Bantuan peralatan kesenian di UPT/	Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kesenian di UPT	5 UPT	-	140.000.000	154.000.000		186.340.000	5 UPT	UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa	
		1 14 1 15 15	Bimtek/sosialisasi rujukan pasien di UPT	Terlaksananya Bimtek/sosialisasi rujukan pasien di UPT	5 UPT	-	80.000.000	88.000.000		106.480.000	5 UPT	UPT Bina di P. Lombok & P. Sumbawa	
Meningkatnya kualitas penempatan dan pembinaan tenaga kerja	Penempatan dan pembinaan tenaga kerja	1 14 1 16	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja									Bid. Penempatan dan Perluasan Kerja	
		1 14 1 16 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	20 Bk	151.587.500	166.746.250	69.200.000	201.762.963	221.939.259	20 Bk	Prov.	
		1 14 1 16 4	Penanganan TKI Bermasalah	Terlaksananya penanganan TKI Bermasalah	2.475 Org	372.740.000	1.074.980.000	555.794.000	951.250.000	1.430.798.380	2.475 Org	Prov.	

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnakertrans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 16 5	Mitra Praja Utama (MPU) Bid. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Terlaksananya koordinasi MPU (MPU) Bid. Nakertrans	1 Keg.	35.000.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	1 Keg.		Prov.
		1 14 1 16 6	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Terlaksananya LTSP	35.312 Org	1.717.838.000	350.000.000	270.200.000	227.835.000	465.850.000	35.312 Org		Prov.
		2 01 01 16 07	Terapan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pelatihan terapan TTG	20 Org			75.000.000	70.492.500	80.000.000	20 org		
		2 01 10 16 10	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya pelayanan perizinan TKA	150 Org		51.062.500	30.868.000	47.654.300	60.950.000	150 org		
		2 01 01 16 13	Monitoring dan evaluasi program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Telaksananya monev pengembangan kesempatan kerja	1 Keg	143.149.500	46.157.500	35.170.50	15.000.000	46.150.000	1 Keg		
		2 01 01 16 17	Pelatihan kewirausahaan bagi eks TKI/migran	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan eks TKI migran	200 Org				279.842.700	379.000.000	200 Org		
		2 01 01 16 18	Padat Karya Produktif [DBHC HT]	Terlaksananya kegiatan Padat Karya Produktif	800 Org/ 8 Lok	123.134.000	100.000.000	105.909.000	852.000.000	900.000.000	800 org / 8 Lok		
		2 01 01 16 20	Informasi Pasar Kerja [job fair] [DBHC HT]	Tersebaranya Informasi Pasar Kerja melalui Job Fair	700 Org/ 2 Keg				532.193.000	750.000.000	700 Org / 2 Keg		
		2 01 01 16 22	Pemberdayaan tenaga kerja mandiri [DBHC HT]	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	160 Org	596.282.000	904.527.500	250.000.000	445.000.000	900.00.000	160 Org		
		2 01 01 16 23	Peluang Kerja melalui AKAD dan AKAN	Terbukanya peluang kerja melalui AKAD dan AKAN	40 Org/ 2 Keg		83.800.000	46.521.400	55.000.000	83.000.000	40 Org / 2 Keg		
		1 14 1 16 9	Penyusun Profil Ketenagakerjaan	Tersusunnya Buku Profil Ketenagakerjaan	20 Bk	33.900.000	39.000.000	53.900.000	47.190.000	51.909.000	20 Buku		Provinsi

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 16 11	Rapat Koordinasi Daerah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Terlaksananya rapat koordinasi Bidang Ketenagakerjaan	1 Keg	171.472.500	182.000.000	200.200.000	220.220.000	242.242.000	1 Keg	Provinsi	
		1 14 1 16 14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Terlaksananya koordinasi ketenagakerjaan	1 Keg	256.997.000	750.000.000	825.000.000	907.500.000	998.250.000	1 Keg	Luar Provinsi NTB, LN	
		1 14 1 16 15	Peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	Tersedianya peluang kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	75 Org	-	207.300.000	228.030.000	250.833.000	275.916.300	75 Org	Prov. Kalimantan dan Sumatra	
		1 14 1 16 17	Sosialisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Terlaksananya sosialisasi IMTA	200 Org	-	154.250.000	169.675.000	186.642.500	205.306.750	200 Org	Provi	
		1 14 1 16 18	Job Fair	Terlaksananya Job Fair	4.500 Orang	-	200.000.000	191.200.000	242.000.000	266.200.000	4.500 Org	Provi	
Meningkatnya kualitas pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi	Kualitas pelayanan perpindahan dan penempatan transmigrasi	1 14 1 16	Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi									Bid. Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi	
		1 14 1 16 1	Pendaftaran dan seleksi	Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon transmigran	1 Keg	80.000.000	18.975.000	20.872.500	22.959.750	25.255.725	1 Keg	Kab/Kota se P. Lombok	
		1 14 1 16 2	Penyusunan Profil UPT Bina	Tersusunnya Buku Profil UPT Bina	5 UPT	50.000.000	31.625.000	34.787.500	38.266.250	42.092.875	5 UPT	Prov	
		1 14 1 16 3	Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)	Terlaksananya KOPTRANS	1 Keg	4.980.000.000,-	632.500.000	31.161.400		841.857.500	1 Keg	Prov	
		1 14 1 16 4	Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD)	Tersusunnya NKSAD	1 Keg	62.310.000	63.250.000	36.595.500	76.532.500	84.185.750	1 Keg	Prov	

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnakertrans		
						2014	2015	2016	2017				
		1 14 1 16 6	Pelatihan Bahan Bangunan	Terlaksananya Pelatihan Bahan Bangunan	30 Org	91.230.500	100.353.550	110.388.905	121.427.796	133.570.576	30 Org	Prov	
		1 14 1 16 5	Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monev	6 Kl	48.185.000	55.000.000	33.580.500		73.205.000	6 Kl	Prov	
		1 14 1 16 8	Bimtek Geographic Information System	Tersedianya Data Pemetaan Daerah Transmigrasi	1 Keg	-	150.000.000	165.000.000		199.650.000	1 Keg	Prov	
			Optimalisasi program ketransmigrasian	Terlaksananya optimalisasi program ketransmigrasian	50 Org		131.062.500	115.190.500		131.500.000	50 Org		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan syarat kerja hubungan industrial	Kualitas pelaksanaan syarat kerja hubungan industrial	1 14 1 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									Bid. Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan	
		1 14 1 17 5	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Optimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi	11 Lbg	82.225.000	125.000.000	108.500.000	100.000.000	166.375.000	11 Lbg	Kab/Kota	
		2 01 01 17 09	Pemberdayaan ketenagakerjaan pada peringatan hari buruh internasional	Terlaksananya peringatan hari buruh internasional	200 Org			107.995.000	96.490.000	108.000.000	200 Org		
		2 01 01 17 13	Pengembangan sistem pengupahan daerah	Tresusunnya dokumen sistem pengupahan daerah	10 Kab/Kota			132.000.000	80.016.100	132.000.000	10 Kab/Kota		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnakertrans		
						2014	2015	2016	2017				
		2 01 01 17 22	Monitoring dan evaluasi program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan se Prov. NTB	Terlaksananya monev kegiatan ketenagakerjaan	1 Keg		36.185.000	30.371.000	15.300.000	30.371.000	1 Keg		
		2 10 10 17 23	Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan	Terlaksananya pembinaan HI dan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan	20 Prsh				66.792.300	75.000.000	20 Prsh		
Meningkatnya pembinaan penerapan norma-norma ketenagakerjaan	Penerapan norma-norma ketenagakerjaan		Program Pengawasan Ketenagakerjaan										
		2 01 01 18 01	Peningkatan pemahaman SDM K3 dalam rangka bulan K3	Terlaksananya pembinaan K3 pada perusahaan	25 Prsh			153.247.500	45.000.000	65.000.000	25 Prsh		
		2 01 01 18 02	Pembinaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Terlaksananya pembinaan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	20 Prsh	110.000.000	121.000.000	95.000.000	45.000.000	155.851.000	20 Prsh	Prov	
		2 01 01 18 03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	20 Prsh	110.000.000	121.000.000	90.000.000	45.000.000	155.851.000	20 Prsh	Prov	
		2 01 01 18 04	Pengawasan dan pemeriksaan tempat penampungan CTKI	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan tempat penampungan CTKI	3 Prov		75.000.000	36.000.000	46.313.100	40.000.000	3 Prov		
		2 01 01 18 09	Pemetaan kasus ketenagakerjaan	Terlaksananya pemetaan kasus	25 Prsh				45.028.500	60.000.000	25 Prsh		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung jawab	Lok
						Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun 2018	Kondisi Kinerja pada Akhir priode Renstra Disnaker trans		
						2014	2015	2016	2017				
				ketenagakerjaan									
		2 01 01 18 10	Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Terlaksananya penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	1 Kasus				40.452.800	60.000.000	1 Kasus		
		2 01 01 18 11	Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan ketenagakerjaan Pulau Lombok	Terlaksananya optimalisasi Balai Pengawasan ketenagakerjaan Pulau Lombok	40 Prsh				145.127.500	165.000.000	40 Prsh		
		2 01 01 18 12	Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan ketenagakerjaan Pulau Sumbawa	Terlaksananya optimalisasi Balai Pengawasan ketenagakerjaan Pulau Sumbawa	20 Prsh				109.943.000	120.000.000	20 Prsh		
		1 14 1 17 13	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	10 Kab/ Kota	125.372.000	150.000.000	165.000.000		199.650.000	10 Kab/ Kota		Kab /Kota
		1 14 1 17 16	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan	Terlaksananya Monev	6 Kali	48.185.000	55.000.000	60.500.000	12.700.000	73.205.000	6 kali		Prov
		2 01 01 18 06	Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan tembakau	Terlaksananya pengawasan dan dan pengujian K3 di perusahaan rokok dan tembakau	25 Prsh				22.459.000	25.000.000	25 Prsh		
		1 14 1 17 17	Peningkatan SDM dan Kualitas Tenaga Kerja	Terlaksananya pelatihan bagi SDM paramedis	33 Org	94.450.000	103.895.000	114.284.500		138.284.245	33 Orang		Provi
		1 14 1 17 11	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Lingkungan dan Pengujian Kesehatan Kerja	200 Org (4 Keg) dan 2000 target pengujian kesehatan	66.000.000	72.600.000	79.860.000		94.412.800	200 orang (4 Kegiatan) dan 2000 target pengujian kesehatan		Provi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Penyusunan Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Disnakertrans
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Sat	Kondisi Awal RPJMD	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	TPT	Skor	5.38	5,75	5,69	5,03	4.82	4.55	4.55

BAB VII

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama bagi seluruh aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan atau ketransmigrasian, guna pencapaian sasaran yang lebih efisien, efektif dan berkualitas.